

Jalan Kabupaten di Wonogiri Rusak

WONOGIRI (KR) - Ketua DPRD Wonogiri Sriyono SPd mengungkapkan pihaknya banyak menerima keluhan menyusul rusaknya jalan milik Pemprov Jawa Tengah maupun jalan kabupaten di daerah tersebut. Jalan milik Kabupaten Wonogiri saja ada 280 KM yang rusak dan butuh biaya Rp 10-15 miliar untuk perbaikan. Ditemui usai sidang paripurna Selasa (28/2) siang, Sriyono mengatakan pihaknya banyak menerima aduan soal rusaknya jalan saat wakil rakyat reses. "Kita dapat banyak aduan itu. Jalan yang berubang. Memang jalan provinsi itu kan jalan utama," katanya.

Jalan milik provinsi itu berada di sejumlah titik. Di antaranya di wilayah Kecamatan Jatisono, Ngadirojo dan lainnya. Diduga, jalan yang rusak itu karena curah hujan yang tinggi belakangan ini. Sriyono mengatakan, usai mendapatkan aduan rusaknya jalan milik provinsi, pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti DPU. "Kita juga koordinasikan dengan teman-teman DPRD Provinsi dari fraksi masing-masing. Informasinya, pemeliharaan (jalan) juga ada anggarannya," kata Sriyono. Sementara untuk jalan milik Pemkab Wonogiri, pihaknya bakal berkoordinasi dengan bupati. Dengan begitu, bisa dilakukan tindakan secara langsung.

Kepala DPU Kabupaten Wonogiri Ir Prihadi Ariyanto MT mengatakan pihaknya telah melaporkan ke dinas di provinsi terkait adanya jalan yang rusak. Pihaknya menunggu penangan lebih lanjut terkait jalan provinsi yang rusak itu. "Yang jelas sudah kita laporkan ruas jalan yang rusak. Misalnya ruas jalan Ngadirojo-Giriwoyo dan Ngadirojo ke arah timur. Termasuk Purwatoro-Jeruk yang merupakan milik provinsi," katanya. **(Dsh)-f**



KR-Djoko Santoso HP

Petugas Bina Marga melakukan tambal sulam jalan rusak.

PMI Boyolali Gelar Musyawarah Kerja

BOYOLALI (KR) - Palang Merah Indonesia (PMI) Boyolali menyelenggarakan Musyawarah Kerja (Musker) Tahun 2022 dengan acara laporan pertanggungjawaban kerja tahun 2022 dan merancang rencana kerja dan anggaran tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Komplek Kabupaten Boyolali pada Selasa (28/2).

Ketua PMI Kabupaten Boyolali Sunarno menjelaskan, rencana kerja tahun 2023 ini memiliki tuntutan untuk lebih inovatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang dihadapi. Pihaknya menambahkan, di tahun 2023 ini akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan SDM relawan PMI dengan diadakannya seminar.

Sekda Kabupaten Boyolali Masruri berharap dengan laporan pertanggungjawaban ini pengelolaan PMI terbuka dan bisa disebarluaskan kepada masyarakat tentang PMI di Kabupaten Boyolali. Meski dinilai sudah baik, pihaknya tetap memotivasi PMI untuk lebih meningkatkan kinerja lebih baik lagi. "PMI harus bermanfaat kepada masyarakat dan berguna kepada masyarakat," tandasnya. erbagai capaian PMI di tahun 2022 meliputi Survei kepuasan Masyarakat penerima manfaat layanan PMI dengan hasil 90 % lebih memuaskan dan berbagai masukan dan saran dapat ditindaklanjuti sebanyak lebih dari 2736 Responden yang terlibat. Kemudian PMI Boyolali juga dapat memproduksi Darah sebanyak 11.700 kantong darah sehat dan dapat mencukupi kebutuhan Darah di Kabupaten Boyolali. **(R-3)-f**

Kabupaten Klaten Kembali Raih Adipura

KLATEN (KR) - Setelah menanti selama 27 tahun, akhirnya Kabupaten Klaten kembali meraih penghargaan Adipura dari KemEntrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, untuk kategori Kota Kecil. Penghargaan diterima Bupati Klaten, Sri Mulyani, pada puncak acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Auditorium Dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (28/2).

Bupati Klaten Sri Mulyani, mengemukakan, penghargaan tersebut dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Bupati mengucapkan terimakasih pada seluruh masyarakat, jajaran pemerintah Kabupaten Klaten khususnya OPD terkait, serta para relawan. "Relawan kemarin luar biasa mensupport kami, sehingga tahun 2023 ini meraih Adipura. Ini untuk masyarakat. Kabupaeten Klaten harus lebih bersih, lebih hebat, lebih keren, dan masyarakatnya harus maju, mandiri dan sejahtera," kata Sri Mulyani.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Srihadi mengatakan, Adipura sebagai anugerah untuk kabupaten yang mengelola lingkungan dengan baik, utamanya terkait sampah. Kabupaten Klaten dinilai sudah layak mendapatkan penghargaan, diantaranya karena dalam pengelolaan sampah sudah maksimal. Anugerah Adipura tersebut menjadi momentum yang sangat mengembirakan, karena Klaten sempat gagal meraih penghargaan Adipura selama 27 tahun. Namun berkat upaya dan kerja keras berbagai elemen, penantian panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil. **(Sit)-f**



KR-Dokumen

Bupati Klaten Sri Mulyani menunjukkan Piala Adipura.

Komisi A dan D Bojonegoro 'Ngangsu Kawruh' ke DPRD Grobogan



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - Komisi A dan D DPRD Bojonegoro Jatim *ngangsu kawruh* ke DPRD Grobogan. Komisi A *ngangsu kawruh* tentang penanganan pedagang kaki lima (PKL), sedangkan Komisi D tentang tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer. Rombongan diterima Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Grobogan Agoes Prasetyo AP SH dan Kabag Program dan Keuangan Karsono Joni Setyawan SSos di ruang rapat Paripurna II Setwan, Rabu (22/2) pekan lalu.

Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Lasmiran, menjelaskan, kedatangannya ke DPRD Grobogan ingin mengetahui persoalan THL. Karena sampai saat ini masalah THL menjadi problem tersendiri bagi Pemkab Bojonegoro, menyusul rencana pemerintah pusat dalam hal

ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menghapus THL per November 2023. Padahal THL masih sangat dibutuhkan pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Grobogan Agoes Prasetyo AP SH, menegaskan, masalah THL juga dialami Pemkab Grobogan. Keberadaannya juga dibutuhkan di OPD yang ada di Pemkab Grobogan, termasuk di lingkungan Setwan. "Seperti kita ketahui bersama, bahwa tenaga honorer atau THL akan dihapus pemerintah per November 2023. Selain PNS atau ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), nantinya hanya ada tenaga outsourcing untuk posisi sopir atau driver, tenaga kebersihan, dan Satpam," terang Agoes.

Sekretaris Daerah Grobogan Dr Ir HM Sumarsono MSI pernah mengatakan kepada wartawan, bahwa tenaga honorer masih dibutuhkan di daerahnya. "Jika tenaga honorer dihapus, maka kegiatan pemerintah tidak bisa berjalan sesuai harapan. Masalah tersebut sudah kami sampaikan ke Menteri PANRB, terangnya belum lama ini. Dicontohkan pada sektor pendidikan, di mana setiap tahunnya ada perekrutan CPNS untuk formasi guru SD. Namun, jumlahnya masih saja kurang dari kebutuhan.

"Meskipun setiap tahun melakukan pengisian guru, tapi realnya masih tetap kurang," papar Sekda tanpa menyebut jumlah kekurangan yang dimaksud. Pihaknya mengaku sudah menanyakan konsep dari pemerintah pusat mengenai honororer yang tidak ikut terekut

dalam PPPK dan CPNS. Namun pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian belum memiliki konsep tersebut. Dia pun berharap, kajian tersebut nantinya sudah selesai sebelum November 2023.

Sedangkan Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin, menilai, penanganan PKL di Grobogan cukup baik sehingga PKL dalam kota Purwodadi tidak menampati di sembarang tempat seperti di bahu jalan atau trotoar. "Pemkab Bojonegoro akan meniru cara yang telah

dilakukan Pemkab Grobogan dalam usaha menertibkan PKL. Sebenarnya Satpol PP Kabupaten Bojonegoro sudah beberapa kali melakukan penertiban PKL yang berjualan di badan jalan dan trotoar. Namun hasilnya kurang maksimal," aku politisi PPP itu.

Menanggapi hal itu, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Grobogan Agoes Prasetyo AP SH, menegaskan, keberadaan PKL dalam kota sebenarnya sangat diperlukan. **(Tas)-f**



KR-M Taslim

Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Setwan Grobogan saat menerima Ketua dan anggota Komisi A dan D DPRD Bojonegoro.

Polda Jateng Gelar Operasional 2023

MAGELANG (KR) - Polda Jateng melaksanakan Gelar Operasional Tahun 2023 yang diikuti oleh para pejabat utama Polri di tingkat Polda hingga tingkat Polres. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Atria Kota Magelang, Selasa (28/2).

Dalam keterangan persnya, Waka Polda Jateng Brigjen Pol Abioso Seno Aji menyebutkan tujuan dari acara tersebut adalah untuk mengevaluasi kinerja Polda Jateng dan jajaran guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif sepanjang pentahapan pemilu 2024. "Karena seperti yang kita tahu bersama, tahun 2023 ini sudah masuk tahun politik untuk menuju ke tahun 2024,"

ujarnya. Abioso berharap melalui Gelar Operasional yang dilaksanakan ini dapat mewujudkan tahapan pesta demokrasi yang tertib dan aman di tahun 2024.

"Tentunya ini seperti harapan masyarakat kita semua yang menginginkan suasana pesta demokrasi yang tertib dan aman, bukan hanya harapan kepolisian," tambahnya. Dikatakan, Ja-

teng tidak termasuk wilayah rawan dalam Pemilu 2024. Namun masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga persatuan, meskipun mempunyai pilihan yang berbeda.

Kehadiran Polri dalam setiap proses tahapan Pemilu 2024 adalah untuk memberikan Cooling System di tengah semarak pesta demokrasi. Diperkirakan sekitar 2/3 kekuatan Polda Jateng dan jajaran akan diterjunkan langsung selama masa tersebut.

"Pemilu 2024 juga menjadi momen sejarah karena merupakan pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif dan kepala daerah serentak di-

lakukan pada saat yang sama," Abioso.

Abioso menyebut pentingnya peran serta media dalam memberikan edukasi dan literasi bagi masyarakat melalui pemberitaan, baik di media cetak, elektronik maupun di media sosial. Di hadapan media, juga menitip pesan pada masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kondusifitas kamtibmas selama pesta demokrasi tersebut.

"Yang namanya pesta tentunya ada berbagai warna di dalamnya. Namun siapapun nanti yang jadi pemimpin, warnanya hanya satu, tetap Merah Putih," tutur Abioso. **(Tha/Cry)-f**

WALIKOTA MAGELANG BERIKAN PENGHARGAAN

Puskesmas Santun Lansia dan Ramah Anak

MAGELANG (KR) - Penghargaan Puskesmas Santun Lansia dan Puskesmas Ramah Anak diberikan pertama kalinya di Kota Magelang kepada beberapa Puskesmas di Kota Magelang, Senin (27/2). Secara bergantian Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH FINASIM menyerahkan

penghargaan kepada beberapa Puskesmas yang meraihnya saat apel pagi di halaman belakang kompleks Kantor Walikota Magelang, Senin.

Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Magelang Heni Yuniarti kepada KR diantaranya mengatakan penghargaan

Puskesmas Santun Lansia diberikan kepada Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kepada lansia dengan berbagai spesifikasi pelayanan.

Misalnya mendahulukan pasien lansia, mulai dari pendaftaran sudah disambut dengan ramah, sehingga lansia yang datang ke Puskesmas mendapatkan kenyamanan. Secara fasilitas, Puskesmas ini juga menyediakan kursi tunggu prioritas untuk lansia dan ada tulisannya. Juga ada fasilitas di kamar mandi yang mendukung lansia, ada pegangannya. Termasuk akses masuk ke Puskesmas, juga ada pegangannya. "Ini termasuk salah satu bentuk dukungan Puskesmas memberikan layanan terbaik untuk lansia,"

katanya. Puskesmas yang ramah anak, merupakan salah satu bentuk dukungan Dinas Kesehatan Kota Magelang dalam mewujudkan Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak (KLA). Sebagai KLA, dukungan Dinas Kesehatan Kota Magelang adalah bagaimana caranya memberikan pelayanan ramah anak, salah satunya dengan menyediakan poli khusus tersendiri untuk anak, mulai dari balita hingga usia anak.

Di Puskesmas juga menyediakan sarana bermain anak. Saat anak datang ke Puskesmas tidak merasa takut, tidak merasa jenuh karena menunggu antrian. Disitu ada area yang memang khusus bermain anak, sambil me-

nunggu pelayanan di Puskesmas. "Hari ini kita memberikan apresiasi kepada Puskesmas yang telah mendukung, salah satunya transformasi layanan primer, yaitu Puskesmas Santun Lansia dan Puskesmas Ramah Anak," tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr Istikomah secara terpisah kepada KR mengatakan sudah lama ditetapkan semua Puskesmas di Kota Magelang sebagai Puskesmas Ramah Anak dan Santun Lansia. Itu harus konsisten memenuhi indikator yang tidak sekadar slogan.

Untuk menjadi Puskesmas Santun Lansia dan Ramah Anak banyak parameter yang harus dipenuhi. **(Tha)-f**



KR-Thoha

Walikota Magelang menyerahkan penghargaan.

PT Sido Muncul Incar ISO 50001

SEMARANG (KR) - Setelah sukses meraih berbagai penghargaan skala nasional, kini PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul mengincar ISO 50001 : 2018, yaitu penerapan sistem manajemen pengelolaan konsumsi energi dan menghemat energi. Salah satu langkah menuju ISO 50001, Sido Muncul melakukan Auditor Training terhadap 45 karyawan Sido Muncul yang terpilih menjalani pelatihan dan training khusus dalam mengelola manajemen energi.

Demikian dikatakan Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Irwan Hidayat kepada wartawan di Semarang (28/2), saat meninjau jalannya training. Upaya untuk mendapatkan sertifikat ISO 50001 ini juga dalam rangka membantu pemerintah dalam per-

soalan lingkungan. Saat ini, Sido Muncul sedang melakukan proses implementasi ISO 50001 : 2018 untuk lingkungan sebagai upaya meningkatkan kinerja energi, efisiensi energi dan penghematan biaya energi.

Irwan mengatakan sering bicara soal penghematan energi, tapi pihaknya belum tahu berapa tingkat efisiensi yang diperoleh dana program hemat energi tersebut. Cost masing-masing produksi dalam pabrik tidak diketahui. iDengan adanya ISO 50001 : 2018 ini, kita akan tahu berapa penghematan energi di masing-masing elemen dalam produksi," tutur Irwan Hidayat.

Irwan Hidayat mengatakan, ISO 50001 merupakan sistem manajemen pengelolaan konsumsi energi dan menghemat efisiensi energi. Dengan

melakukan evaluasi pemakaian energi, dapat diketahui apakah pemakaian energi sudah lebih efisien dibandingkan sebelumnya atau tidak. Dengan ISO 50001 data penggunaan energi juga lebih akurat, sehingga saat membutuhkan investasi baru, perusahaan dapat memilih penggunaan teknologi hemat energi untuk mendukung program efisiensi energi.

"Kita bersyukur, implementasi ISO 50001 di Sido Muncul mendapat dukungan dari Kementerian ESDM melalui Dirjen EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) yang bekerjasama dengan UNDP Indonesia melalui program nasional Market Transformation For Renewable Energy dan Energy Efficiency (MTRE3)," tutur Irwan Hidayat.

Keuntungan dalam me-

nerapkan standar ISO 50001 bagi perusahaan, bisa mendapatkan efisiensi biaya operasional di sektor energi. Pada awal implementasi, target efisiensi pemakaian energi sebesar 5% di akhir tahun 2023.

Untuk mewujudkan ISO 50001, perusahaan harus membuat kebijakan Energi sebagai komitmen

untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan melakukan tinjauan Manajemen secara periodik, untuk mengevaluasi kinerja energi, pengukuran kepatuhan terhadap persyaratan standar ISO 50001 dan penentuan program penghematan energi periode berikutnya. **(Bdi)-f**



KR-Budiono

Irwan Hidayat (baju merah) meninjau Auditor Training.